

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global yang paling mendesak pada abad ke-21. Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menunjukkan bahwa meningkatnya suhu bumi, kenaikan permukaan laut, dan meningkatnya intensitas bencana alam merupakan dampak langsung dari tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia (IPCC,2021). Temuan tersebut menegaskan bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi dapat menimbulkan efek berantai (*domino effect*) terhadap stabilitas ekonomi, keamanan manusia, hingga tata kelola global. Kompleksitas permasalahan ini menyebabkan perubahan iklim tidak dapat ditangani secara unilateral, melainkan membutuhkan respons kolektif melalui mekanisme kerjasama internasional.

Sebagai respons atas urgensi tersebut, komunitas internasional membentuk *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992 sebagai kerangka utama kerjasama multilateral dalam menangani perubahan iklim. UNFCCC berfungsi sebagai arena negosiasi kebijakan iklim global yang mempertemukan negara-negara dengan kepentingan, kapasitas, dan tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Dalam kerangka UNFCCC, pertemuan tahunan *Conference of the Parties* (COP) menjadi forum sentral untuk mengevaluasi komitmen negara, merumuskan kebijakan lanjutan, serta menilai implementasi aksi iklim global (UNFCCC, 2016). COP tidak hanya sebagai ruang

negosiasi antar negara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-negara seperti organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Keterlibatan aktor tersebut menjadikan COP sebagai ruang kerjasama *multi level* yang tidak hanya menghasilkan keputusan politik tetapi juga membentuk narasi publik global. Salah satu capaian signifikan dalam proses COP adalah disepakatinya *Paris Agreement* pada COP21 tahun 2015. Perjanjian ini menetapkan target bersama untuk menahan laju kenaikan suhu bumi agar tidak melampaui 1.5°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri (UNFCCC, 2016). *Paris Agreement* kemudian memberikan arah bagi proses COP dengan menempatkan evaluasi komitmen nasional sebagai bagian penting dari agenda berkelanjutan konferensi tersebut.

Di tengah dinamika yang terjadi, posisi Inggris dalam tata kelola iklim global turut mengalami perubahan setelah negara tersebut resmi keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020. Sebelum *Brexit*, Inggris menjadi bagian dari kerangka diplomasi dan pembiayaan iklim kolektif Uni Eropa yang memiliki pengaruh signifikan dalam negosiasi perubahan iklim internasional, pasca-*Brexit*, Inggris tidak lagi berada dalam kerangka kebijakan dan pembiayaan iklim kolektif Uni Eropa (Dupont & Moore, 2019). Sehingga dituntut untuk membangun kembali kredibilitas serta kapasitas kepemimpinan iklimnya secara mandiri. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan bagi Pemerintah Inggris untuk menunjukkan bahwa komitmen politik dan dukungan finansialnya terhadap agenda perubahan iklim global tetap kuat meskipun tidak lagi menjadi bagian dari struktur kolektif Uni Eropa.

Momentum tersebut terlihat ketika Inggris terpilih sebagai Presiden COP26 tahun 2021 di Glasgow. COP26 diproyeksikan sebagai konferensi penting karena menjadi momentum evaluasi komitmen negara-negara sejak *Paris Agreement* (European Council, 2021). Sebagai Presiden COP26, Inggris tidak hanya berfungsi sebagai tuan rumah, tetapi juga berperan dalam mengarahkan fokus dan prioritas pembahasan COP26. Dengan demikian, keberhasilan COP26 turut berkaitan dengan kemampuan Inggris dalam mengelola proses dan membangun dukungan internasional terhadap agenda yang dibawa. Namun, momentum tersebut berlangsung di tengah situasi yang tidak normal.

Penyelenggaraan COP26 menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020. Pandemi menyebabkan penundaan pelaksanaan COP26 dari tahun 2020 ke tahun 2021, sekaligus menciptakan keterbatasan mobilitas fisik dan pembatasan pertemuan tatap muka. Selain itu, pandemi juga menggeser prioritas kebijakan negara ke arah pemulihan kesehatan dan ekonomi, sehingga berpotensi menurunkan perhatian publik dan pemerintah terhadap isu perubahan iklim. Situasi ini menempatkan presidensi COP26 pada tantangan ganda, yaitu menjaga keberlanjutan agenda iklim global sekaligus mempertahankan tingkat perhatian dan komitmen negara di tengah krisis global, serta memperkuat legitimasi kepemimpinan Inggris pasca-*Brexit*.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Inggris tetap menetapkan empat prioritas utama dalam COP26 meliputi; (1) Mitigasi, yang berfokus mencapai *net-zero* pada pertengahan abad dan menjaga suhu bumi 1.5°C tetap dalam jangkauan; (2) Adaptasi, berfokus pada adaptasi untuk melindungi

komunitas dan habitat natural; (3) Finansial, berfokus pada mobilisasi finansial; dan (4) Kolaborasi, fokus pada kerjasama dalam mewujudkan aksi-aksi dalam menangani isu perubahan iklim (Coleman, 2021). Penetapan prioritas ini menunjukkan upaya Inggris untuk menjaga fokus dan arah agenda COP26 di tengah kondisi yang tidak kondusif. Namun demikian, keberhasilan keempat prioritas tersebut tidak hanya bergantung pada negosiasi elit antar negara, melainkan juga pada kemampuan Pemerintah Inggris dalam membangun dukungan dan partisipasi publik internasional.

Urgensi keterlibatan publik secara luas tercermin dalam laporan Pemerintah Inggris *A climate for ambition: Diplomatic for COP26: Government Response*, yang menyatakan bahwa:

COP26 akan menjadi momen krusial bagi aksi iklim global. Kami merasa optimis dengan banyaknya negara yang telah menekankan pentingnya agenda iklim dalam forum internasional; COP26 kini harus mengubah kata-kata tersebut menjadi tindakan. Presidensi Inggris harus menggalang partisipasi publik agar ketika negara-negara mengajukan target iklim yang ambisius, janji-janji tersebut didukung oleh masyarakat di seluruh dunia. (*Foreign Affairs Committee*, 2021)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik dipandang sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan agenda iklim global. Dukungan publik dianggap penting untuk memastikan bahwa komitmen iklim dapat dilakukan dalam tindakan nyata dan berkelanjutan secara global. Urgensi keterlibatan publik ini semakin menguat dalam konteks pandemi COVID-19, dimana bentuk diplomasi publik secara konvensional tidak lagi memadai. Pemerintah Inggris dituntut untuk mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih adaptif dengan

memaksimalkan pemanfaatan platform digital sebagai sarana komunikasi, legitimasi, dan mobilisasi dukungan global.

Platform digital memungkinkan pemerintah menjangkau audiens internasional secara lebih luas, cepat, dan efisien, sekaligus memfasilitasi interaksi dua arah di tengah keterbatasan mobilitas fisik. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan dan praktik komunikasi digital Pemerintah Inggris melalui *Foreign, Commonwealth and Development Office* (FCDO) yang sejak 2012 menegaskan pemanfaatan platform digital sebagai bagian integral diplomasi Inggris, serta sebagai sarana untuk berinteraksi, mendengarkan, dan membangun hubungan dengan publik global (FCDO, 2012). Dalam konteks COP26, praktik ini menjadi semakin relevan karena memungkinkan Inggris untuk menyampaikan narasi mengenai peran dan posisi Inggris dalam kepemimpinan iklim, mempromosikan prioritas presidensi, serta kerjasama dengan berbagai aktor non-negara dalam memperluas pesan aksi iklim di tengah keterbatasan akibat pandemi.

Dalam konteks inilah diplomasi digital menjadi relevan secara teoritis dan empiris. Diplomasi digital dipahami sebagai bentuk praktik komunikasi pemerintah yang memungkinkan penyebaran informasi, pembentukan narasi, dan membangun interaksi dua arah melalui platform digital seperti media sosial. Ilan Manor (2016) menekankan bahwa diplomasi digital mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap lingkungan komunikasi baru yang bersifat *real-time*, terbuka, dan partisipatif (Manor, 2016). Perkembangan teknologi, akses internet, dan budaya komunikasi interaktif, mendorong negara melakukan pendekatan

diplomasi publik dari model satu arah (monolog) menuju komunikasi yang lebih kolaboratif.

Dengan demikian, penyelenggaraan COP26 di tengah pandemi COVID-19 memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji diplomasi digital Pemerintah Inggris dalam isu perubahan iklim, khususnya dalam pengelolaan komunikasi, pembentukan narasi, serta pelibatan publik global melalui platform digital. Tantangan keterbatasan mobilitas fisik dan kebutuhan membangun legitimasi internasional menjadikan diplomasi digital sebagai instrumen penting dalam mendukung komunikasi dan keterlibatan publik selama COP26. Meskipun diplomasi digital memiliki relevansi penting dalam konteks penyelenggaraan COP26, kajian akademik yang secara khusus menganalisis diplomasi digital Pemerintah Inggris sebagai Presiden COP26 masih terbatas.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diplomasi digital telah menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri negara-negara, termasuk Inggris. Namun, kajian tersebut belum secara spesifik menjelaskan bagaimana praktik diplomasi digital dijalankan dalam isu perubahan iklim pada forum multilateral berskala global seperti COP26. Aspek-aspek seperti pembentukan narasi iklim global, pengelolaan komunikasi digital, serta pelibatan aktor non-negara melalui media sosial selama penyelenggaraan COP26 masih jarang dikaji. Oleh karena itu, beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai rujukan dan informasi tambahan bagi penulis untuk mengisi celah analisis tersebut.

Penelitian pertama yang berjudul “*The UK Digital Diplomacy after the Withdrawal from the EU : rebranding or innovative strategy?*” oleh Vincenzo Coppola (2021). Penelitian ini menganalisis bagaimana Inggris memanfaatkan diplomasi digital sebagai instrumen kebijakan luar negeri setelah keluar dari Uni Eropa untuk memperkuat citra *Global Britain*. Coppola menunjukkan bahwa pemerintah Inggris mengadopsi strategi komunikasi digital yang lebih interaktif melalui pemanfaatan media sosial, peningkatan keterlibatan audiens, serta pembangunan narasi nasional yang konsisten di ruang digital. Studi ini menegaskan bahwa diplomasi digital telah menjadi alat strategis dalam kebijakan luar negeri Inggris (Coppola, 2022). Namun penelitian ini belum mengkaji bagaimana pendekatan tersebut diterapkan dalam isu perubahan iklim, khususnya dalam konteks forum multilateral global seperti COP26.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Siti Amaliah Hasan (2021) berjudul “Diplomasi Digital UK terhadap Mesir Melalui Media Sosial Twitter dalam Bidang Pendidikan Pada 2014-2018”. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi digital Inggris mampu meningkatkan keterlibatan publik serta memperkuat citra positif Inggris melalui konten yang relevan dan interaktif (Hasan, 2021). Kendati demikian, konteks penelitian ini bersifat bilateral dan sektoral, dengan fokus pada isu pendidikan dan budaya, sehingga belum menjelaskan bagaimana diplomasi digital Inggris dijalankan dalam isu global yang bersifat lintas negara maupun dalam forum multilateral internasional.

Penelitian berjudul “Diplomasi Digital Jepang Terhadap Indonesia Melalui Akun Instagram @Jpnamsindonesia” oleh Afif Ridha Ramadhan dan Viani

Puspita Sari (2022). Penelitian ini mengkaji bagaimana aktor negara, melalui peran seorang Duta Besar Jepang, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan budaya, pendidikan, serta bahasa Jepang di Indonesia. Dengan menggunakan konsep diplomasi digital Ilan Manor, penelitian ini menyoroti engagement, listening, dan pendekatan kolaboratif dalam membangun penerimaan publik di negara tujuan (Ramadhan & Sari, 2021). Meskipun memberikan kontribusi konseptual dalam memahami praktik diplomasi digital, penelitian ini tetap berfokus pada hubungan bilateral Jepang–Indonesia dan ranah promosi budaya, sehingga belum mengkaji diplomasi digital dalam isu global strategis seperti perubahan iklim atau dalam konteks forum multilateral.

Selain kajian yang berfokus pada negara, terdapat pula penelitian yang menyoroti peran aktor non-negara dalam isu perubahan iklim. Salah satunya adalah penelitian oleh Rizka Komala Dewi berjudul “Peran Diplomasi Selebritas Blackpink dalam Isu Perubahan Iklim Dunia Tahun 2020-2023”. Penelitian ini membahas bagaimana kelompok selebritas Blackpink berperan sebagai aktor non-negara dalam mengkampanyekan isu perubahan iklim melalui media sosial, serta kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran publik global, penggalangan dana, dan dukungan politik melalui keterlibatan dalam COP26 (Dewi, 2025). Studi ini menegaskan pentingnya soft power dan diplomasi selebritas dalam isu global. Namun demikian, fokus utama penelitian ini adalah diplomasi selebritas dan peran aktor non-negara, bukan pada praktik diplomasi digital yang dijalankan oleh pemerintah Inggris sebagai aktor negara dan pemegang presidensi COP26.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai diplomasi digital memang telah banyak dilakukan, namun belum secara spesifik membahas diplomasi digital Pemerintah Inggris dalam isu perubahan iklim pada forum multilateral seperti COP26 dengan menggunakan kerangka manfaat diplomasi digital oleh Ilan Manor. Studi Coppola (2021) lebih menekankan pada rebranding Inggris pasca-Brexit, Hasan (2021) berfokus pada hubungan bilateral Inggris–Mesir, dan Ramadhan & Sari (2022) mengkaji diplomasi digital Jepang dalam konteks promosi budaya. Sementara itu, penelitian Dewi (2025) menyoroti peran diplomasi selebritas dalam COP26, bukan diplomasi digital pemerintah sebagai aktor utama.

Dengan demikian, penyelenggaraan COP26 di tengah pandemi COVID-19 menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji diplomasi digital Pemerintah Inggris dalam forum multilateral perubahan iklim. Fokus penelitian ini bukan untuk mengukur keberhasilan atau dampak kebijakan iklim yang dihasilkan, melainkan untuk menganalisis bagaimana diplomasi digital tersebut dijalankan serta manfaat yang tercermin dalam pengelolaan komunikasi internasional, pembentukan narasi, dan pelibatan publik global melalui platform digital. Dalam konteks Inggris pasca-Brexit yang berada dalam sorotan internasional, strategi komunikasi digital menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi dan posisi kepemimpinan selama COP26.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa manfaat penggunaan diplomasi digital bagi Pemerintah Inggris melalui penyelenggaraan COP26 di tingkat global?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Pelaksanaan penelitian ini sebagai pemenuhan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat diplomasi digital bagi Pemerintah Inggris dalam isu perubahan iklim melalui penyelenggaraan COP26 di tingkat global berdasarkan manfaat diplomasi digital oleh Ilan Manor, serta mengidentifikasi manfaat yang tercermin dari praktik tersebut.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Manfaat Diplomasi Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik diplomasi publik negara. Diplomasi publik yang sebelumnya dijalankan melalui komunikasi satu arah dan bersifat elitis kini bergeser menuju pola komunikasi dua arah yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga strategis, karena negara kini dapat menjangkau publik internasional secara langsung,

membentuk persepsi terhadap kebijakan luar negeri, serta membangun hubungan jangka panjang di ruang digital. Dalam konteks ini, diplomasi digital dipahami bukan sekadar sebagai penggunaan teknologi, tetapi sebagai instrumen yang memungkinkan negara memperluas pengaruh, mengelola citra, dan meningkatkan legitimasi di tingkat global (Manor, 2016).

Ilan Manor (2016) dalam bukunya yang berjudul *Are We There Yet: Have MFAs Realized the Potential of Digital Diplomacy?* mengidentifikasi sejumlah manfaat yang dapat diperoleh negara melalui pemanfaatan platform digital dalam praktik diplomasi digital. Dalam penelitian ini, manfaat tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi manfaat diplomasi digital yang dikategorikan menjadi delapan bagian. Pertama, *Practice of New Public Diplomacy*, merujuk pada pergeseran pola diplomasi publik yang bersifat satu arah dan elitis menuju komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan partisipatif melalui pemanfaatan internet dan media sosial. Pergeseran tersebut memberikan manfaat bagi negara dalam memperluas jangkauan audiens internasional serta membangun komunikasi yang lebih responsif dan interaktif dengan publik global. Dengan demikian, diplomasi digital memungkinkan negara menjalankan fungsi diplomasi publik secara lebih adaptif di era komunikasi digital.

Kedua, *Engagement and Listening*, menggambarkan keterlibatan pemerintah dengan publik secara daring. Keterlibatan tersebut mencakup interaksi dua arah yang memungkinkan pemerintah tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga merespons dan memperhatikan opini serta

tanggapan publik. Hal ini memberikan manfaat untuk negara dalam menyesuaikan komunikasi kebijakan luar negeri berdasarkan respons audiens digital. Dengan demikian, diplomasi digital memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan opini publik internasional.

Ketiga, *Selfie Diplomacy*, merujuk pada praktik representasi diri negara di ruang digital melalui pemanfaatan media sosial resmi pemerintah. Berangkat dari gagasan *nation branding*, hal tersebut untuk menunjukkan bagaimana negara menyusun dan menampilkan identitas, nilai, serta peran yang ingin ditonjolkan kepada publik internasional melalui narasi, visual, dan aktivitas diplomatik yang dibagikan secara daring. praktik memiliki manfaat yang terletak pada kemampuan negara untuk mengelola citra dan membingkai identitasnya secara langsung di hadapan audiens global, tanpa sepenuhnya bergantung pada media tradisional. Namun, tidak dimaknai sebagai pengukuran perubahan reputasi jangka panjang, melainkan sebagai bentuk representasi diri di ruang digital.

Keempat, *Online Q&A Sessios* atau sesi tanya jawab daring merujuk pada bentuk praktik diplomasi digital yang menampilkan interaksi tanya-jawab antara institusi pemerintah dan publik melalui platform digital. Manor menjelaskan bahwa meskipun komunikasi ini bersifat terbatas dan terkurasi, namun praktik tersebut tetap mencerminkan pergeseran dari pola komunikasi satu arah menuju dialog yang lebih terbuka. Dimana manfaat dari

hal ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan klarifikasi kebijakan serta merespons isu yang berkembang.

Kelima, *Frame the Nation* berkaitan dengan kemampuan mbingkai informasi dan menawarkan interpretasi tertentu terhadap suatu isu melalui media sosial. Dalam konteks meningkatnya ketergantungan publik pada platform digital sebagai sumber informasi internasional, negara memiliki peluang untuk mempengaruhi cara suatu peristiwa atau kebijakan dipahami oleh audiens global. Manor menjelaskan bahwa melalui framing, pemerintah dapat memberikan rujukan makna yang membantu membentuk persepsi publik. Ini memberikan manfaat pada kapasitas negara untuk mengelola narasi dan memposisikan isu sesuai dengan sudut pandang yang ingin ditampilkan di ruang komunikasi digital.

Keenam, *Overcoming the Limitations of Traditional Diplomacy*, Manor menekankan pada kemampuan media sosial dan platform digital untuk menjadi alternatif saluran komunikasi ketika diplomasi konvensional menghadapi hambatan geografis, politik, maupun keterbatasan hubungan diplomatik formal. Salah satu contoh yang dikemukakan Manor adalah konsep “kedutaan virtual”, yang memungkinkan negara tetap menjangkau publik luar negeri meskipun tidak memiliki perwakilan fisik. Manfaat yang diperoleh dari hal tersebut terletak pada fleksibilitas dan efisiensi komunikasi, karena negara dapat tetap membangun hubungan dan menyampaikan pesan tanpa terikat oleh batasan struktural diplomasi tradisional.

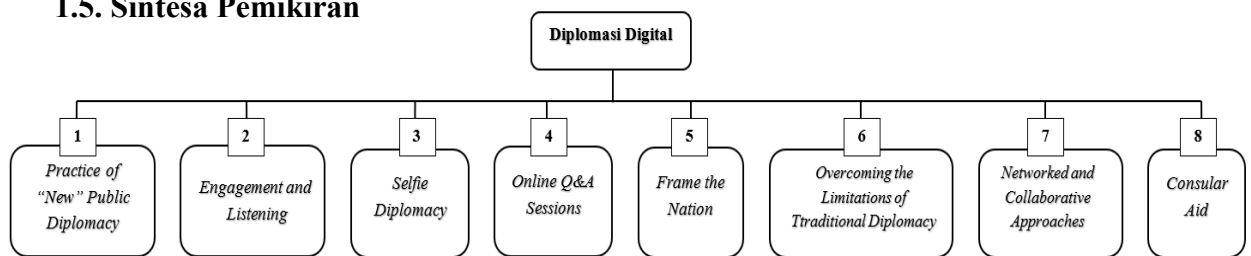
Ketujuh, *Networked and Collaborative Approaches*, dalam diplomasi digital didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai tantangan global saat ini bersifat lintas batas dan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor. Diplomasi digital memungkinkan negara membangun jejaring dengan pemerintah lain, organisasi masyarakat sipil, komunitas daring, serta individu berpengaruh melalui platform digital. Manfaat pendekatan ini terletak pada kemampuannya memperluas dukungan dan memperkuat kerja sama melalui platform digital. Melalui jejaring tersebut, negara dapat membangun komunikasi dengan berbagai aktor internasional secara lebih kolaboratif, sehingga diplomasi tidak lagi bersifat satu arah.

Kedelapan, *Consular Aid* merujuk pada pemanfaatan media sosial dalam pemberian bantuan konsuler kepada warga negara yang berada di luar negeri, terutama dalam situasi krisis seperti bencana alam, konflik, atau kondisi darurat lainnya. Kehadiran platform digital memungkinkan pemerintah menyampaikan peringatan, informasi penting, serta koordinasi bantuan secara cepat dan real time. Dimana memberikan manfaat dalam peningkatan kecepatan dan jangkauan komunikasi dalam situasi darurat, sehingga negara dapat merespons kebutuhan warganya secara lebih efektif melalui saluran digital.

Berdasarkan delapan manfaat dari diplomasi digital yang dikemukakan oleh Ilan Manor, penelitian ini menggunakan seluruhnya sebagai kerangka analisis. Kedelapan dari kerangka analisis tersebut dipahami sebagai manfaat dan kapasitas yang dapat diperoleh negara melalui pemanfaatan platform

digital dalam praktik diplomasi digital. Dengan menggunakan seluruhnya secara sistematis, penelitian ini berupaya melihat praktik diplomasi digital secara lebih menyeluruh sesuai dengan konsep yang digunakan. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara kerangka konsep dan analisis yang akan dibahas dalam penelitian.

1.5. Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 *The Benefit of Digital Diplomacy*
 Sumber: Manor, 2016 (diolah kembali oleh penulis)

Perkembangan teknologi digital mengubah praktik diplomasi publik menjadi lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Transformasi ini menghadirkan berbagai manfaat bagi negara dalam menjalankan komunikasi internasional melalui media sosial dan platform digital. Diplomasi digital dipahami sebagai bentuk adaptasi negara dalam mengelola komunikasi, membangun hubungan, dan membentuk narasi di ruang digital. Mengacu pada Ilan Manor (2016), penggunaan diplomasi digital dapat diidentifikasi melalui delapan manfaat yang meliputi, *Practice of New Public Diplomacy*, *Engagement and Listening*, *Selfie Diplomacy*, *Online Q&A Sessions*, *Frame the Nation*, *Overcoming the Limitations of Traditional Diplomacy*, *Networked and Collaborative Approaches*, dan *Consular Aid*. Melalui kerangka tersebut, dapat terlihat berbagai manfaat diplomasi digital, seperti perluasan partisipasi publik, peningkatan interaktivitas, kemampuan

pembingkaihan isu, penguatan jejaring kolaboratif, serta perluasan jangkauan komunikasi lintas batas melalui media digital. Dengan demikian, sintesa pemikiran ini menempatkan kedelapan manfaat diplomasi digital tersebut sebagai dasar konseptual untuk menganalisis manfaat diplomasi digital bagi negara dalam pengelolaan komunikasi dan pelibatan publik di ruang digital.

1.6. Argumen Utama

Pada penyelenggaraan COP26, Pemerintah Inggris melakukan diplomasi digital sebagai instrumen strategis untuk mengelola komunikasi internasional dan memperkuat posisinya dalam isu perubahan iklim. Melalui akun resmi seperti @COP26, @FCDOGovUK, @BorisJohnson, dan @AlokSharma_RDG menunjukkan *practice new public diplomacy*, di mana komunikasi tidak lagi bersifat satu arah dan elitis, melainkan lebih terbuka dan menjangkau publik global secara langsung. Interaksi daring, respons terhadap audiens, serta pemantauan opini publik mencerminkan manfaat dari *engagement and listening*. Sementara penggunaan konten visual pejabat negara dan aktivitas konferensi merepresentasikan praktik *selfie diplomacy* dalam membentuk citra Inggris sebagai aktor yang proaktif dalam isu perubahan iklim. Selain itu, pelaksanaan dialog virtual dan penyampaian informasi secara terbuka menunjukkan bentuk *online Q&A sessions* sebagai upaya meningkatkan transparansi komunikasi.

Lebih lanjut, kampanye “Together for Our Planet” memperlihatkan praktik *frame the nation* dalam membingkai Inggris sebagai aktor yang berkomitmen terhadap aksi iklim global. Pemanfaatan platform digital di tengah pembatasan

mobilitas akibat pandemi menunjukkan kemampuan *overcoming the limitations of traditional diplomacy*, karena komunikasi dan mobilisasi dukungan tetap berlangsung tanpa ketergantungan pada pertemuan fisik. Keterlibatan aktor non-negara dan figur publik internasional mencerminkan pendekatan *networked and collaborative* yang memperluas jejaring dukungan global, sementara penyampaian informasi resmi terkait protokol kesehatan dan kebijakan perjalanan selama COP26 menunjukkan manfaat *consular aid* dalam diplomasi digital yang berupa dukungan informasi publik secara daring. Dengan demikian, diplomasi digital yang dijalankan Pemerintah Inggris selama COP26 tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan komunikasi digital dan keterbatasan akibat pandemi, tetapi juga menunjukkan manfaat dalam bentuk perluasan jangkauan komunikasi, penguatan legitimasi, serta pengelolaan narasi internasional.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Waruwu (2023) penelitian deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan dan menjelaskan makna peristiwa, fenomena, dan situasi sosial tertentu (Waruwu, 2023). Penulis menggunakan tipe penelitian ini karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik diplomasi digital Pemerintah Inggris dalam isu perubahan iklim pada pelaksanaan COP26. Proses analisis tersebut dilakukan dengan mengacu pada manfaat diplomasi digital oleh Ilan Manor sebagai kerangka analisis.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini mencakup periode tahun 2020-2021 dengan fokus utama pada penyelenggaraan COP26 pada tahun 2021. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan bahwa praktik diplomasi digital tidak hanya muncul pada saat pelaksanaan konferensi, tetapi juga terlihat dalam tahap persiapan, pembentukan narasi, dan pengelolaan komunikasi publik sebelum COP26 dilaksanakan. Selain itu, penundaan COP26 akibat pandemi COVID-19 sekaligus kondisi Inggris yang telah keluar dari Uni Eropa menjadikannya sebagai sorotan internasional, sehingga tahap pra-pelaksanaan sebagai bagian penting dalam praktik diplomasi digital Pemerintah Inggris. Penelitian ini dibatasi pada COP26 karena Inggris berperan sebagai tuan rumah sekaligus presidensi konferensi, sehingga memiliki peran sentral dalam menjalankan diplomasi digital terkait isu perubahan iklim.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan studi dokumen, dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dari berbagai sumber meliputi dokumen, publikasi pemerintah, publikasi media, situs web, dan internet yang relevan dengan topik penelitian (Sulung & Muspawi, 2024). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dari dokumen resmi, pernyataan pemerintah, artikel pada situs resmi, serta media sosial Pemerintah Inggris dan COP26. Platform media sosial yang dianalisis meliputi “X” (*Twitter*) dan *YouTube*. Pemilihan kedua platform tersebut dipilih karena merepresentasikan fungsi

komunikasi digital yang berbeda, di mana X digunakan untuk penyampaian informasi dan interaksi secara real time dan YouTube digunakan untuk penyampaian narasi resmi melalui pidato, siaran langsung, dan dokumentasi kegiatan. Data-data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi manfaat diplomasi digital bagi Pemerintah Inggris dalam penyelenggaraan COP26 dengan menggunakan kerangka analisis diplomasi digital milik Ilan Manor.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Patton dalam (Sofwatillah et al., 2024), analisis data kualitatif merupakan proses menyusun dan mengatur data secara sistematis, kemudian mengelompokkannya ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar agar lebih mudah dipahami. Dimana analisis ini bertujuan untuk memahami makna pesan komunikasi yang disampaikan melalui teks, gambar, maupun video dalam konten digital Pemerintah Inggris terkait COP26. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan pesan yang merefleksikan praktik diplomasi digital dalam isu perubahan iklim.

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi unggahan media sosial resmi Pemerintah Inggris dan COP26, pernyataan resmi pemerintah, serta dokumen yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah. Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori analisis yang merujuk pada delapan manfaat diplomasi digital yang dikemukakan oleh Ilan Manor. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pemilahan data, pengelompokan

berdasarkan kategori manfaat, serta interpretasi terhadap makna dan pola komunikasi yang muncul untuk menganalisis bagaimana praktik diplomasi digital tersebut merefleksikan manfaat bagi posisi dan kepentingan Inggris dalam pelaksanaan COP26.

1.7.5. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumentasi utama, dan metodologi penelitian. Dimana metodologi penelitian terbagi kedalam dalam beberapa subab meliputi, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pemaparan terkait manfaat diplomasi digital bagi Pemerintah Inggris selama penyelenggaraan COP26 berdasarkan manfaat diplomasi digital milik Ilan Manor meliputi, pertama *practice “new” public diplomacy*, kedua *listening and engagement*, ketiga *selfie diplomacy* dan keempat *online Q&A sessions*.

Bab III berisi pemaparan terkait manfaat diplomasi digital bagi Pemerintah Inggris selama penyelenggaraan COP26 berdasarkan manfaat lainnya, kelima *frame the nation*, keenam *overcoming the limitations of traditional diplomacy*, ketujuh *networked and collaborative approaches*, dan kedelapan *consular aid*.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait hasil dari penelitian.